

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli  
Daerah (PAD)**

**Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Tahun 2010-2014**



Nama : Akbar Fauzi Prawira

Nim : 11313095

Prodi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

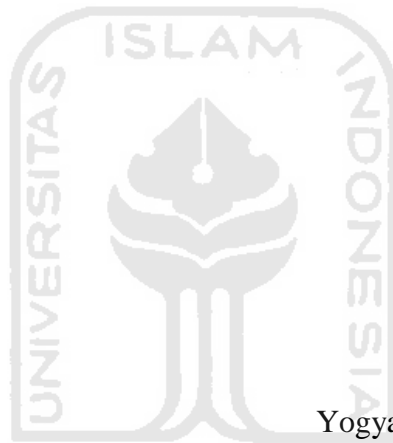
**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.



Yogyakarta, 13 September 2016



Akbar Fauzi Prawira

**PENGESAHAN**

**Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi di  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2010-2014**

Nama : Muh. Tyas Zulfikar

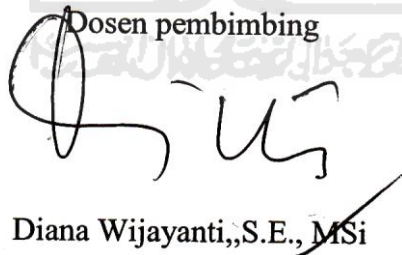
Nim : 11313105

Prodi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 8 november 2016

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing



Diana Wijayanti,,S.E., MSi

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **AKBAR FAUZI PRAWIRA**

Nomor Mahasiswa : **11313095**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 18 Oktober 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.

Penguji : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Suharto, SE., M.Si.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



**Dr. D. Agus Harjito, M.Si.**

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmatNya  
skripsi ini dapat diselesaikan*

*Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku*

*Kepada Bapak, Ibu dan adikku*

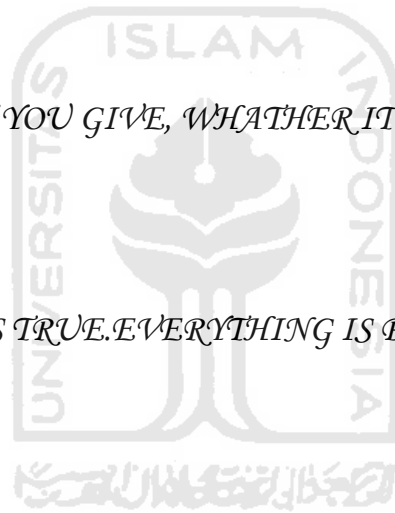
*Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, kepercayaan  
dan doa tulus yang selalu dipanjatkan kepadaku*

*Kupersembahkan juga karya ini kepada sahabat Aditya eka priambudi, teman  
teman sejawat di KKN unit 23, kolega – kolega di d'Varo beserta rombongan  
anak anak ganteng mubazir IE 2011, sahabat yang sudah lebih dari lima tahun  
bersama. serta wanita yang sedangku perjuangankan yang tiada pernah  
hentinya mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan dukungan  
kepada ku dalam menyelesaikan skripsi ini.*

## MOTTO

*-YOU GET WHAT YOU GIVE, WHATEVER IT'S GOOD OR BAD-*

*-NOTHING IS TRUE. EVERYTHING IS PERMITTED-*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya dengan segala kenikmatan-nya yang tiada terhingga terlimpahkan kepada hamba-Nya. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang seperti saat ini. Senantiasa menegakkan ajaran agama Islam sebagai jalan keselamatan bagi seluruh makhluk dan semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata S-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan penelitian ini, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan jauh dari kata sempurna, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak – pihak terkait lainnya. Selanjutnya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada::

1. Kedua Orangtuaku tercinta, dan yang tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya.

2. Ibu Diana Wijayanti.S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing dengan kesabarannya telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Kawan - kawan seperjuangan dari Semester Awal yang selalu. Dan juga Semua keluarga Ilmu Ekonomi dari segala angkatan.
6. Teman – teman KKN Unit Kabupaten Sleman, Desa Glagaharjo, Dusun Singlar
7. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis menyelesaikan skripsi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah S.W.T. Akhirnya, penulis berharap semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan dapat memanfaatkannya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 2016

Penulis

(Akbar Fauzi Prawira)



## DAFTAR ISI

### BAB I

#### PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Batasan Masalah.....	8
1.3	Rumusan Masalah .....	9
1.4	Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.5	Sistematika Penulisan .....	10

### BAB II

#### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1	Kajian Pustaka.....	11
2.2	Landasan Teori.....	13
2.2.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.2.2	Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.....	17
2.2.2.1	Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.3	Kerangka Penelitian .....	27
2.3.1	Hubungan pengeluaran pemerintah dengan PAD.....	27
2.3.2	Hubungan PDRB dengan PAD.....	28
2.3.3	Hubungan jumlah penduduk dengan PAD.....	29
2.3.4	Hubungan jumlah wisatawan dengan PAD.....	29
2.4	Hipotesis.....	29

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Jenis dan Sumber Data .....	31
3.2.	Definisi Operasional Variabel.....	31
3.2.1.	Pendapatan Asli Daerah (Y).....	31
3.2.2.	Pengeluaran Pemerintah (X1) .....	32
3.2.3.	Produk Domestik Regional Bruto (X2) .....	32
3.2.4.	Jumlah Penduduk (X3).....	32
3.2.5.	Jumlah Wisatawan (X4).....	32
3.3.	Metode Analisis .....	33
3.3.1	Common effect model.....	34
3.3.2	Fixed effect model.....	34
3.3.3	Random effect model .....	34
3.4	Pemilihan Model dalam Pengolahan Data .....	35
3.5	Pengujian Hipotesis.....	35
3.5.1	Koefisien Determinan ( $R^2$ )Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	35
3.5.2	Uji F .....	36
3.5.3	Uji T .....	37

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

4.1	Analisis Deskriptif .....	38
4.2.	Hasil Uji Model Regresi Panel.....	41

4.2.1. Pemilihan model dalam pengolahan data.....	41
4.2.2. Interpretasi persamaan regresi.....	44
4.2.3. Pengujian Hipotesis.....	46
4.2.3.1 Uji T (Pengujian Variabel secara individu) .....	46
4.2.3.2 Uji F (Uji hipotesis Koefisien Regresi secara menyeluruh).....	47
4.2.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	48
4.3.1 Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD .....	48
4.3.2 Analisis pengaruh PDRB Terhadap PAD .....	49
4.3.3 Analisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD .....	50
4.3.4 Analisis pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap PAD.....	51
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Saran.....	54

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 BAB III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

- b. Dana Alokasi Khusus ( DAK )
- c. Dana Alokasi Umum ( DAU )
- d. Dana Bagi Hasil ( DBH )
- e. Pinjaman Daerah dll

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

Soleh dan Rochmansjah (2010), menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Adanya Dana Perimbangan melalui DAU ini ternyata justru menjadi ketergantungan.

Prakosa (2007) mengatakan bahwa adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat tersebut, bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	PAD (Dalam Ribuan Rupiah)
1.	2010	740.202.076
2.	2011	867.112.885
3.	2012	800.156.498
4.	2013	1.216.102.750
5.	2014	1.233.738.562

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. DIY

PAD Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun terus meningkat, terlihat dalam Tabel 1.1 peningkatan PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi bisa dilihat di tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan. Namun setiap tahun ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya menuju kemandirian daerah dibuktikan dengan terus meningkatnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat yang tercermin dari perolehan DAU yang terus meningkat di setiap tahunnya.

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui Dana Bagi Hasil Pajak

dengan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lainnya dapat meningkatkan kemandirian.

Santosa dan Rahayu (2005) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

**Tabel 1.2**  
**Pengeluaran Belanja Pemerintah**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah Daerah (Jutaan Rupiah)
1.	2010	1.630.773.451
2.	2011	1.859.142.795
3.	2012	2.156.863.309
4.	2013	2.509.643.374
5.	2014	3.330.069.350

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. DIY

Dari Tabel 1.2 menunjukkan tabel pengeluaran belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Dari tabel dijelaskan bahwa belanja daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan kebutuhan fiskalnya.

Santosa dan Rahayu (2005) Mengatakan hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.



**Tabel 1.3**  
**PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	PDRB (Dalam Jutaan Rupiah)
1.	2010	64.678.968
2.	2011	68.049.874
3.	2012	71.702.449
4.	2013	75.637.007
5.	2014	79.557.248

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. DIY

Tabel 1.3 menunjukkan tentang PDRB di Daerah Istimewa atas dasar harga konstan tahun 2010 – 2014. Dari tabel diatas dijelaskan bahwa PDRB Yogyakarta tiap tahunnya mengalami peningkatan, ini menandakan terjadinya tren positif.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk yang tinggi diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2010	3.457 491
2.	2011	3.509 997
3.	2012	3.552 462
4.	2013	3.594 854
5.	2014	3.637 116

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. DIY

Tabel 1.4 menunjukkan tentang jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tabel diatas dijelaskan bahwa tiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014 jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami tren yang positif, yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan. pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Wisatawan Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Jumlah Wisatawan
2010	8.270.988
2011	9.300.786
2012	11.379.640
2013	12.842.295
2014	16.774.235

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. DIY

Tabel 1.5 menunjukkan tingkat kunjungan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tiap tahun jumlah kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami tren positif dimana tiap tahun selalu mengalami kenaikan dengan begitu pendapatan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ikut meningkat. Perkembangan pariwisata berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, salah satu diantaranya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan pemerintah (Cohen, 1984). Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah daerah maupun masyarakat. Marpaung (2002) mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.

## **1.2. Batasan Masalah**

Dalam skripsi dengan judul diatas, untuk mempermudah melakukan analisis, penulis membatasi permasalahan sehingga tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan yang menjadi arah penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada masalah faktor – faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan visi pembangunan bidang ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu perekonomian yang maju melalui pertumbuhan ekonomi dengan potensi yang dimiliki dengan ditunjang oleh kemampuan sumber daya dan daya dukung yang lebih intensif dapat dilihat melalui proporsi Jumlah Penduduk, PDRB, dan

Pengeluaran Pemerintah. Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dianalisis menggunakan metode regresi dari data panel, dengan Eviews yang data – datanya berasal dari data sekunder dari BPS.

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis pengaruh Faktor Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menganalisis pengaruh apakah Faktor PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Menganalisis Faktor Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Menganalisis Faktor Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Data dan Informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak – pihak yang melakukan penelitian serupa.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab I. Pendahuluan**

Menjelaskan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian

### **Bab II. Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Berisikan kajian pustaka dari penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti serta teori – teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan beberapa variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian.

### **Bab III. Metode Penelitian**

Berisikan jenis dan cara pengumpulan data yang dilakukan, definisi operasional variabel dan metode analisis yang dilakukan dalam penelitian.

### **Bab IV. Hasil dan Analisis**

Memaparkan pengujian atas data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta pembahasan lebih lanjut hasil penelitian dan hasil analisis data.

### **Bab V. Simpulan dan Implikasi**

Berisi tentang simpulan serta implikasi dari jawaban atas rumusan masalah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Yudi (2001), menggunakan variabel PAD sebagai variabel dependen sedangkan variabel independennya PDRB, sumber pendapatan baru, jumlah penduduk. Variabel – variabel tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian tentang pengaruh PDRB, sumber pendapatan baru, dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis model regresi kuadrat terkecil (OLS). Kesimpulan penelitian PDRB, sumber pendapatan baru dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

Ismawan (2000), menggunakan variabel PAD sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah Laju inflasi, jumlah industri, hasil produksi logam timah dan PDRB. Variabel – variabel diatas digunakan untuk mengetahui hasil dari permasalahan penelitian tentang pengaruh PDRB, inflasi, penerimaan jumlah industri, hasil produksi logam timah dalam mempengaruhi PAD ( Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan digunakan adalah analisis metode kuadrat terkecil (OLS) regresi berganda. Kesimpulan penelitian adalah penerimaan PDRB, Laju inflasi, penerimaan jumlah industri, hasil produksi timah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Imah (2004), menggunakan variabel PAD sebagai variabel dependen, sedangkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan jumlah penduduk sebagai variabel independen. Variabel-variabel tersebut untuk mengetahui permasalahan penelitian tentang besar pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, jumlah penduduk dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Kesimpulan penelitian adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Indramayu.

Lintantia Fajar Apriesta, Miyasto (2013) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan adalah desentralisasi fiskal, pajak daerah, pertumbuhan populasi atau jumlah penduduk, tenaga kerja, ketimpangan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (Ordinary Least Square) data panel. Model analisis regresi menggunakan regresi biasa. Dari Tabel dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t-statistik kurang dari nilai  $\alpha$  0,05 berarti signifikan atau  $H_0$  diterima, variabel desentralisasi fiskal, populasi penduduk, dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel pajak memiliki nilai probabilitas t-statistik lebih dari 0,05  $H_0$  ditolak berarti tidak signifikan. Pajak daerah mempunyai hasil tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, tujuan awal pajak daerah adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga pajak akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Lintangia Fajar Apriesa, Miyasto (2013) adalah pada penggunaan metode regresi panel data dengan analisis Ordinary Least Square (OLS). Sedangkan perbedaannya adalah subyek penelitian, variabel yang digunakan, yaitu pajak dan pertumbuhan ekonomi.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2003, pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sedangkan yang dapat dikategorikan dengan pendapatan daerah dalam undang-undang tersebut adalah : PAD, Dana Perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK serta lain-lain pendapatan yang sah.

Abdul Halim (2001), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yaitu,
  - a. Hasil Pajak Daerah



- b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang sah
2. Dana Perimbangan
  3. Pinjaman Daerah
  4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penggolongan diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ada 2 macam cara dalam meningkatkan PAD ( Hamrolie, 2004 ), yaitu:

1. Menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah
2. Menetapkan target PAD setiap tahun secara rasional

Mengenai sumber-sumber PAD, secara khusus akan dijelaskan berikut ini:

- a. Pajak Daerah

Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat Pemerintahan Daerah, yaitu: Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis Pajak Propinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan Di atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C
  7. Pajak Parkir
- b. Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan tertentu

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih Perusahaan Daerah baik bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan yang sah antara lain terdiri dari hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah tidak semuanya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya yaitu: penerimaan lain-lainnya yang sah, kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup penerimaan kecil-kecil, seperti penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari sewa, bunga simpanan giro, serta penerimaan denda dari kontraktor. Walaupun dengan demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

Jadi Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil

Perusahaan milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum ( DAU )
- c. Dana Alokasi Khusus ( DAK )

Pinjaman Daerah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau multilateral. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau kabupaten/kota lainnya.

## **2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD**

### **2.2.2.1. Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel – variabel lainnya disebut permintaan agregat. Variabel G menyatakan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditures*), I menyatakan Investment, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijakan - kebijakan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara) disebut juga kebijakan fiskal (Ferry Prasetya, 2012).

Pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh lebih dulu. Jadi pemerintah membuat daftar anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, yang di Indonesia sendiri dijabarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN).

Pengeluaran pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing mempunyai struktur pengeluaran tersendiri dan berbeda.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah, yaitu:

1. Teori Adolf Wagner

Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti dari teori Adolf Wagner yaitu semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan lain sebagainya (Ferry Prasetya, 2012).

2. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan besarnya penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan

normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar pula.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

### 3. Teori Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana perimbangan sendiri meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya bisa diukur melalui perhitungan PDRB, karena perhitungan PDRB mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah, maka angka-angka yang ditampilkan akan mempunyai kegunaan antarlain sebagai parameter kemampuan suatu daerah. Yaitu untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran masyarakat, tingkat inflasi dan deflasi, struktur perekonomian serta mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja dan sektor.

Metodologi Penghitungan :

#### **1. Metode penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku**

Pendapatan Regional Kabupaten Kotamadya atas harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode ini dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Disamping itu manfaat pemakaian data daerah dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah.



Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi, dimana menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, dengan cara mengurangi biaya antara masing-masing dari total produksi bruto tiap-tiap kegiatan, sub sektor dalam jangka waktu tertentu. Menurut BAPPEDA (2003), unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu:

- Pertanian
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas dan Air Minum
- Bangunan
- Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- Jasa-jasa

b. Pendekatan Pendapatan, dimana PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c. Pendekatan Pengeluaran, dimana PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti :

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- Konsumsi pemerintah
- Pembentukan modal tetap domestik bruto
- Perubahan stok
- Ekspor neto

Ketiga pendekatan tersebut secara konsep seharusnya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan harus sama juga dengan jumlah pendekatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto selain yang telah diuraikan diatas disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

Sedangkan metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokasikan pendapatan regional propinsi menjadi pendapatan regional Kabupaten/Kotamadya dengan memakai berbagai macam indikator produksi atau indikator yang cocok lainnya.

## 2. Metode penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dari tahun ketahun menggambarkan perkembangan yang

disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Oleh karenanya untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produktivitas secara nyata, faktor pengaruh atas perubahan harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas harga konstan.

Perhitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut. Produk riil perkapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk perencanaan dan proyeksi pada masa yang akan datang dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari perhitungan atas dasar konstan.

Menurut BAPPEDA (2003), secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan cara :

1. Revaluasi atas kuantum pada tahun berjalan dengan harga tahun dasar.
2. Ekstrapolasi atas nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum.
3. Deflasi atas suatu nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks kerja.

Perkiraan produk/pendapatan domestik atas dasar harga konstan dapat dilakukan pada PDRB menurut lapangan usaha dengan cara menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan untuk berbagai lapangan usaha, atau terhadap PDRB menurut pengeluaran yaitu dengan menghitung komponen pengeluaran atas dasar harga konstan.

### 3. Tabel-tabel turunan PDRB

Setelah didapatkan tabel-tabel pokok PDRB baik secara harga berlaku maupun harga konstan, masih diperlukan tabel-tabel turunan PDRB yang sangat berguna untuk mengetahui perkembangan dan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Adapun jenis-jenis tabel tersebut adalah (BAPPEDA, 2003) sebagai berikut:

#### a. Distribusi Presentase

Besarnya presentase masing-masing sub sektor diperoleh dengan cara membagi nilai sub sektor/sector dengan nilai PDRB kemudian dikalikan dengan 100. Presentase tersebut mencerminkan besarnya peranan masing-masing sub sektor/sector dalam perekonomian suatu daerah, serta menunjukkan struktur perekonomian daerah tersebut.

b. Indeks Perkembangan

Diperoleh dengan cara membagi nilai sub sektor/sector PDRB pada tahun dasar dikalikan 100. Indeks ini berguna untuk mengetahui tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah.

c. Indeks Berantai

Indeks berantai diperoleh dengan cara membagi nilai sub sektor/sector PDRB tahun berjalan dengan nilai sub sektor/sector pada tahun sebelumnya dikalikan dengan 100. Angka indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut untuk tahun berjalan.

d. Indeks Implisit

Diperoleh dengan cara membagi nilai nominal sub sektor/sector PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai nominal sub sektor/sector PDRB atas dasar harga konstan.

**b. Jumlah Penduduk**

Kurniasih (2005), jumlah penduduk adalah sekelompok individu yang melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu wilayah untuk menunjang jalannya kegiatan dalam memenuhi kehidupan bermasyarakat yang diukur dengan satuan jumlah jiwa. Peran penduduk sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara efektif dan bermutu dalam rangka menciptakan kehidupan yang semakin meningkat. Dengan demikian perkembangan sumber daya manusia perlu

diselenggarakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di berbagai bidang.

### **c. Pariwisata**

Marpaung (2002), pariwisata adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Pariwisata merupakan kegiatan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang diperuntukan bagi pariwisata yang meliputi sarana dan prasarana penunjang, kekayaan alam, jasa perseorangan maupun pemerintah, perantara seperti perdagangan serta agen perjalanan, maka sektor pariwisata sering disebut industri pariwisata, hal ini dikemukakan oleh Bull (1991). Dari beberapa definisi pariwisata tersebut maka perkembangan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara.

## **2.3. Kerangka Penelitian**

### **2.3.1. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan PAD**

(Mardiasmo, 2004) Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada membayar pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya,

pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada peningkatan PAD.

### **2.3.2. Hubungan PDRB dengan PAD**

Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per

kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

### **2.3.3. Hubungan jumlah penduduk dengan PAD**

(Budiharjo, 2003) Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Pembangunan sebagai aset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

### **2.3.4. Hubungan jumlah wisatawan dengan PAD**

Jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara menjadi salah satu indikator adanya perkembangan pariwisata di suatu daerah, dimana perkembangan pariwisata berkaitan langsung dengan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.

## **2.4. Hipotesis**

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.



3. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta
4. . Diduga jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dibuat atau dikumpulkan oleh orang lain yang digunakan penulis dalam kurun waktu tertentu. Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini. Ada beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu,

1. Pendapatan Asli Daerah ( Y )
2. Pengeluaran Pemerintah ( X1 )
3. Produk Domestik Regional Bruto ( X2 )
4. Jumlah Penduduk ( X3 )
5. Jumlah Wisatawan ( X4 )

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

##### **3.2.1. Pendapatan Asli Daerah (Y)**

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Satuan

dalam ribu rupiah, data diambil dari Data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014.

### **3.2.2. Pengeluaran Pemerintah (X1)**

Pengeluaran Pemerintah Daerah adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Satuan dalam juta rupiah. Dalam hal ini data Pengeluaran Pemerintah merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014.

### **3.2.3. Produk Domestik Regional Bruto (X2)**

PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) di Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar harga konstan. Dalam hal ini satuan dalam juta rupiah. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014.

### **3.2.4. Jumlah Penduduk (X3)**

Jumlah Penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014.

### **3.2.5. Jumlah Wisatawan (X4)**

Jumlah Wisatawan adalah jumlah pengunjung yang tinggal paling sedikit dua puluh empat jam, akan tetapi tidak lebih dari dua belas bulan di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014.

### 3.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan alat pengolahan data dengan menggunakan *Eviews 5*. Widarjono (2013) dalam bukunya mengatakan ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan dari dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul yaitu penghilangan variabel. Maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N$$

$$t = 1, 2, \dots, T$$

dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N dan T = banyaknya data panel.

Untuk melakukan regresi terhadap variabel maka peneliti menggunakan 3 (tiga) metode. Yaitu:

### 3.3.1 Common effect model

Metode *common effect* merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *ordinary least squares* (OLS). Metode ini diasumsikan bahwa perilaku data antara ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya dalam bentuk linier adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

### 3.3.2 Fixed effect model

Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar ruang dan waktu. Dalam estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan *least squares dummy variables* (LSDV) dan ketika terdapat heteroskedastisitas menggunakan *fixed effect* dengan *cross section weight*. Model dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{5it} + \beta_6 D_{6it} + \beta_7 D_{7it} + \beta_8 D_{8it} + \dots + e_{it}$$

### 3.3.3 Random effect model

Metode ini memilih estimasi data panel dengan *residual* yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap subjek mempunyai intersep yang berbeda. namun

demikian kita mengasumsikan setiap intersep adalah variabel *random* atau *stokastik*. Model untuk *random effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_i$$

### 3.4 Pemilihan Model dalam Pengolahan Data

Ada 3 (tiga) tehnik estimasi dalam data panel, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Untuk mengetahui model mana yang akan digunakan maka perlu diadakan uji pemilihan model. Pemilihan model yang akan digunakan dalam penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Ada 2 (dua) metode yang digunakan dalam pemilihan model. Yaitu:

1. *Chow Test* (uji F-statistik) ialah metode yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan model *fixed effect*.
2. *Uji Hausman* ialah metode yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dan model *random effect*.

### 3.5 Pengujian Hipotesis

#### 3.5.1. Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Kisaran nilai dari  $R^2$  antara 0 dan 1. Dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Begitu juga sebaliknya, seakin kecil nilai  $R^2$  maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel

independen. Dan apabila nilai  $R^2$  sama dengan nol maka tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

### 3.5.2. Uji F

Uji f digunakan untuk mengetahui signifikansi atau tidak signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara menyeluruh.

Langkah-langkah uji f adalah sebagai berikut.

1.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Diartikan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2.  $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3. Menemukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F.

4. Menentukan tingkat signifiakan ( $\alpha$ ) yaitu 5%.

5. Jika nilai Sig-F  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  gagal ditolak, yang artinya variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

6. Sebaliknya jika Sig-F  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang artinya variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

### 3.5.3. Uji t

Uji t adalah teknik uji yang digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Langkah-langkah menguji Hipotesis uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika hipotesis positif

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_0 : \beta_1 > 0$$

2. Jika hipotesis negatif

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_0 : \beta_1 < 0$$

3. Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%.
4. Jika nilai prob. T statistik  $\geq 0.05$ , maka  $H_0$  gagal ditolak, yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Sebaliknya, jika nilai prob. T-statistik  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen.



## BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh Faktor Pengeluaran Pemerintah, Faktor PDRB, Faktor Jumlah Penduduk dan Faktor Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada 5 Kabupaten/kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan teknik analisis Regresi Data Panel.

### 4.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2  
Statistik Deskriptif

	PP?	PDRB?	JP?	JW?	PAD?
Mean	1167594832.28	14387807.36	710084.48	2324328.72	180269325.12
Median	1073458313.00	13407021.00	688135.00	2378209.00	163056459.00
Maximum	1978674627	26740537	1163970	5251352	449270300
Minimum	680895940	5033073	388627	69585	41835415
Std. Dev.	327862270.8	6851992.0	298595.1	1468025.5	128433654.8
Skewness	0.71	0.22	0.20	0.19	0.75
Kurtosis	2.99	1.81	1.47	1.98	2.24
Jarque-Bera	2.12329	1.67587	2.59165	1.23869	2.95656
Probability	0.34589	0.43260	0.27367	0.53830	0.22803
Sum	29200000000	360000000	17752112	58108218	4510000000
Sum Sq. Dev.	2.58E+18	1.13E+15	2.14E+12	5.17E+13	3.96E+17
Observations	25	25	25	25	25
Cross sections	5	5	5	5	5

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel adalah 5 kabupaten/kota se Propinsi DIY. Deskriptif terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar Rp. 180.269.325,12 ribu dan

standar deviasi sebesar Rp. 128.433.654,8 ribu. PAD tertinggi terjadi adalah kabupaten Sleman tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 449270300 ribu dan PAD terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2011 adalah sebesar 41.835.415,8 ribu. Ditinjau dari perkembangan penerimaan PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mulai menggali potensi – potensi pendapatan asli dari daerahnya sehingga PAD dapat meningkat. Sumber pendapatan PAD sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi yang mengalami peningkatan secara berkala. Adanya perbedaan PAD yang cukup tinggi ditunjukkan dengan nilai minimum dan maksimum karena disparitas penerimaan daerah ini masih sangat besar, karena sumber-sumber penerimaan daerah satu dengan lainnya juga berbeda-beda. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografi dll sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan tarif pungutan retribusi sangatlah bervariasi.

Nilai rata-rata Pengeluaran pemerintah adalah sebesar Rp. 1167594832,28 ribu dan standar deviasi sebesar Rp. 327862270,8 ribu. Nilai pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.978.674.627 ribu dan nilai terendah terjadi di kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 680.895.940 ribu. Ditinjau dari perkembangan pengeluaran pemerintah se kabupaten/kota di propinsi DIY cenderung mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan

untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Deskriptif terhadap PDRB memiliki rata-rata sebesar 14387807.36 ribu rupiah dan standar deviasi sebesar 6851992.0 ribu rupiah. PDRB tertinggi terjadi di di kabupaten Sleman tahun 2014 yaitu sebesar 26740537 ribu rupiah dan terendah terjadi di kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sebesar 5033073 ribu rupiah. Dilihat dari perkembangan PDRB dari tahun 2010 hingga 2014 cenderung mengalami peningkatan secara berkala. Hal ini dapat diartikan pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, memberikan indikasi semakin tingginya tingkat pembangunan suatu daerah. Perbedaan nilai minimum dan maksimum yang tinggi menunjukkan adanya kesenjangan PDRB yang masih sangat tinggi.

Nilai rata-rata Jumlah penduduk adalah sebesar 710084.48 ribu jiwa dan standar deviasi sebesar 298595.1 ribu. Jumlah penduduk terbanyak terjadi di Kabupaten Sleman tahun 2014 yaitu sebanyak 1163970 ribu jiwa dan nilai terendah terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 2010 yaitu sebanyak 298595.1 ribu orang. Ditinjau dari perkembangan jumlah penduduk se kabupaten/kota di propinsi DIY cenderung mengalami peningkatan.

Hasil deskriptif terhadap jumlah wisatawan memiliki rata-rata sebesar 2324328.72 dan standar deviasi sebesar 1468025.5. Jumlah wisatawan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 yaitu sebanyak 5251352 wisatawan, sedangkan jumlah wisatawan terkecil terjadi di kabupaten Kulon Progo tahun 2013 yaitu sebanyak 69585 wisatawan. Jika dilihat dari perkembangan jumlah wisatawan diseluruh kabupaten/kota se propinsi DIY menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wisatawan ini disebabkan karena adanya pengembangan potensi wisata yang ada di masing-masing daerah, misalnya di Gunung Kidul dengan potensi pantainya. Begitu juga untuk kabupaten lainnya yang memiliki potensi wisata yang berbeda.

## **4.2. Hasil Uji Model Regresi Panel**

### **4.2.1. Pemilihan model dalam pengolahan data**

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini di tunjukkan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Untuk itu, perlu dilihat masing-masing hasil estimasi dari berbagai model panel data sebagai berikut:

#### **1. Chow Test (uji F-statistik)**

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model estimasi *Fixed Effect*, dengan uji hipotesis:

- a.  $H_0$ : memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.
- b.  $H_1$ : memilih menggunakan model estimasi *fixed effect*.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apa bila signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah *fixed effect*, apabila *p-value* tidak signifikan (lebih dari 5 %) maka model yang digunakan adalah model estimasi *common effect*.

**Tabel 4.2**

**Hasil Uji signifikansi *Fixed effect* dan *Common Effec* (*Chow Tes*)**

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: APOOL  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.338493	(4,16)	0.0000

Sumber: Olahan data Eviews 8.0

Nilai distribusi statistik *F test* dari perhitungan menggunakan *Eviews 8.0* adalah sebesar 28,338 dengan probabilitas 0.000 (kurang dari 5 %), sehingga statistik  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ , menurut hasil estimasi ini model yang tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect*

**2. Uji Hausman**

Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang akan di gunakan antara model estimasi *Fixed Effect* atau model estimasi *Random Effect*, dengan uji hipotesis sebagai berikut:

- a.  $H_0$ : memilih menggunakan model estimasi *Random Effect*.
- b.  $H_1$ : memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*.

Uji Hausman ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value*, apabila *p-value* signifikan (kurang dari 5%) maka model yang di gunakan adalah model

estimasi *Fixed Effect*, sebaliknya bila p-value tidak signifikan (lebih dari 5%) maka model yang digunakan adalah model estimasi *Random Effect*.

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: APOOL  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.209638	4	0.0000

Sumber : Olahan Data Eviews 8.0

Nilai distribusi statistik *Chi Square* dari perhitungan diatas adalah sebesar 28.209 dengan probabilitas 0.0000 (lebih kecil dari 5%), sehingga secara statistik H1 di diterima dan Ho ditolak. Maka model yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

**3. Estimasi *Fixed Effect***

Estimasi ini merupakan teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar variabel namun intersep waktunya sama. Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar variabel dan antar waktu. Berikut estimasi dari *Fixed Effect*.

**Tabel 4.4****Hasil Estimasi *Fixed Effect***

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.80E+08	4.17E+08	-2.349480	0.0320
PP?	-0.021882	0.028553	-0.766347	0.4546
PDRB?	64.41199	13.02606	4.944856	0.0001
JP?	417.1603	846.2911	0.492928	0.6288
JW?	-16.12951	1.459837	-11.04885	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
KP—C	5.59E+08			
GK—C	1.82E+08			
BT—C	-43799669			
SL—C	-6.61E+08			
YK—C	-35641200			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.974870	Mean dependent var	2.56E+08	
Adjusted R-squared	0.962304	S.D. dependent var	1.26E+08	
S.E. of regression	31656159	Sum squared resid	1.60E+16	
F-statistic	77.58470	Durbin-Watson stat	2.788869	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil analisis Fixed Effect maka dapat ditulis persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = -9,80 \times 10^8 - 0,021882 X_{1it} + 64,41199 X_{2it} + 417,1603 X_{3it} - 16,12951 X_{4it} + e_i$$

**4.2. 2. Interpretasi persamaan regresi**

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -9,80 menunjukkan bahwa jika kabupaten/kota di propinsi DIY tidak memiliki pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan ( $x=0$ ) maka PAD akan mengalami penurunan sebesar -9,80 ribu rupiah. Ditinjau konstanta per kabupaten menunjukkan bahwa Kulon progo memiliki PAD tertinggi (5.60) pada saat tidak ada variabel bebas

yang mempengaruhi PAD, dan PAD terendah akibat dampak tersebut adalah Kabupaten Sleman (-6.62).

Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah (PP) sebesar -0.021882 menunjukkan bahwa PAD akan menurun sebesar -0.021882 jika variabel PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan dalam kondisi konstan. Koefisien regresi negatif berarti semakin besar pengeluaran pemerintah semakin rendah PAD yang dicapai daerah tersebut.

Nilai koefisien regresi PDRB sebesar 64.41199 menunjukkan bahwa PAD akan meningkat sebesar 64.41199 jika variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan dalam kondisi konstan. Koefisien regresi positif berarti semakin besar PDRB suatu daerah semakin tinggi pula PAD yang dicapai daerah tersebut.

Nilai koefisien regresi Jumlah penduduk (JP) sebesar 417,1603 menunjukkan bahwa PAD akan meningkat sebesar 417,1603 jika variabel pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah wisatawan dalam kondisi konstan. Koefisien regresi positif berarti semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka akan semakin tinggi pula PAD yang dicapai daerah tersebut.

Nilai koefisien regresi Jumlah wisatawan sebesar -16,12951 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan akan menurun sebesar -16,12951 jika variabel pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk dalam kondisi konstan. Koefisien regresi negatif berarti semakin besar jumlah wisatawan suatu daerah semakin rendah pula PAD yang dicapai daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber-sumber PAD masing-masing daerah berbeda-beda.



Daerah yang PADnya mayoritas berasal dari pajak, maka jumlah wisatawan rendah PADnya tetap akan tinggi seperti Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sebaliknya kabupaten yang mengandalkan PAD dari retribusi daerah khususnya daerah obyek wisata seperti Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul maka meningkatnya jumlah wisatawan akan meningkatkan PAD.

### **4.2.3 Pengujian Hipotesis**

#### **4.2.3.1 Uji T (Pengujian Variabel secara individu)**

Hasil uji t pada masing-masing model dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4

a. Pengujian terhadap Pengeluaran Pemerintah

Koefisien variabel dari pengeluaran pemerintah terhadap PAD adalah sebesar -0,021882 dan t-hitung -0,766347 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.4546(> 5%), sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Dengan demikian besar kecilnya pengeluaran pemerintah belum mampu meningkatkan PAD. Itu artinya  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ .

b. Pengujian terhadap PDRB

Koefisien variabel PDRB terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY adalah sebesar 64,41199 dan t-hitung 4.944856 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0001(< 5%), sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Itu artinya  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_2$ .

c. Pengujian terhadap Jumlah Penduduk (JP)

Koefisien variabel dari jumlah penduduk terhadap PAD adalah sebesar 417,1603 dan t-hitung sebesar 0.492928 sedangkan probabilitas sebesar 0.6288(> 5%),. secara statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pada pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Besar kecilnya jumlah penduduku suatu daerah belum mampu meningkatkan PAD daerah tersebut, sehingga H3 ditolak dan menerima Ho.

d. Pengujian terhadap Jumlah Wisatawan (JW)

Koefisien variabel dari jumlah wisatawan terhadap PAD adalah sebesar -16,12951 dan t-hitung sebesar -11.04885 sedangkan probabilitas sebesar 0.000(<5%),. secara statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah wisawatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pada pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Semakin besar jumlah wisatan suatu daerah justru akan menurunkan PAD daerah tersebut, sehingga H4 ditolak dan menerima Ho.

**4.2.3.2 Uji F (Uji hipotesis Koefisien Regresi secara menyeluruh)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. F-hitung (F-statistik) pada seperti pada Tabel 4.4 dalam perhitungan menggunakan Eviews 8.0 sebesar 77,58470 dan probabilitasnya sebesar 0.0000

(<  $\alpha$  5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi *Fixed Effect*, variabel independen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY.

#### **4.2.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY dapat di jelaskan oleh variabel-variabel independen dari pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan. Pada model estimasi seperti Tabel 4.3 dengan *Fixed effect*,  $R^2$  sebesar 0.9748 sehingga variasi PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY dapat di jelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan sebesar 97,48% dan sisanya 2,52% di jelaskan oleh variabel lain.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi *Fixed Effect* sebesar -0,021882 dan t-hitung -0,766347 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.4546(> 5%). Artinya besar kecilnya pengeluaran pemerintah belum mampu meningkatkan PAD.

Hal ini disebabkan karena disparitas yang cukup besar antar kabupaten dan kota di kabupaten/kota se propinsi DIY, sehingga jumlah

pengeluaran pemerintah ini tidak ditentukan besar kecilnya PAD yang dicapai, sehingga pengeluaran pemerintah banyak didukung dari sumber penerimaan dari dana perimbangan. Pada kabupaten dengan PAD yang kecil belum dapat dipastikan bahwa pengeluaran pemerintahnya akan rendah, dan sebaliknya, karena adanya dana perimbangan. Sebagai contoh kabupaten Gunung Kidul dengan pengeluaran pemerintah yang cukup besar (lebih tinggi dibandingkan kota Yogyakarta), karena untuk membiayai infrastruktur dan pengeluaran lainnya, namun masih memiliki PAD yang paling rendah dibandingkan dengan kota Yogyakarta. Sumber penerimaan PAD sangat ditentukan oleh pajak, retribusi dan pendapatan dari BUMD. Potensi pajak dan retribusi yang rendah, tentunya akan menghasilkan PAD yang rendah, walaupun pengeluaran untuk pembangunan semakin ditingkatkan.

#### **4.3.2 Analisis pengaruh PDRB Terhadap PAD**

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi *Fixed Effect* sebesar 64,41199 dan t-hitung 4.944856 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0001 (< 5%) Artinya apabila PDRB suatu daerah mengalami peningkatan maka jumlah PAD akan mengalami peningkatan dan sebaliknya, jika PDRB semakin menurun maka PAD akan semakin kecil.

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa.

Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Hasil penelitian mendukung penelitian Yudi (2001) yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

#### **4.3.3 Analisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD**

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi *Fixed Effect*

sebesar 417,1603 dan t-hitung sebesar 0.492928 sedangkan probabilitas sebesar 0.6288(> 5%). Artinya besar kecilnya jumlah penduduk suatu daerah tidak mempengaruhi jumlah penerimaan PAD.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah penduduk yang besar tidak memberikan jaminan bagi daerah untuk dapat menggali potensi PAD yang ada. Hal ini masih ditentukan banyak faktor, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga jumlah penduduk yang kecil saja tetapi berkualitas akan lebih potensial dalam meningkatkan PAD suatu daerah. Sebagai contoh dalam kasus ini jumlah penduduk terkecil adalah di kota Yogyakarta tahun 2010, namun penerimaan PADnya justru tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Dengan demikian jumlah penduduk yang besar tidak memberikan jaminan untuk mendapat PAD yang lebih besar.

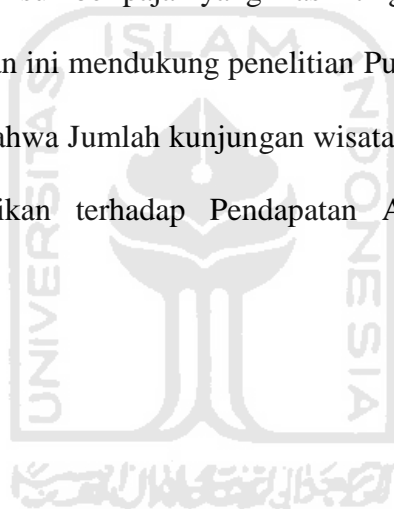
Hasil penelitian tidak mendukung penelitian Yudi (2001), yang menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sleman.

#### **4.3.4 Analisis pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap PAD**

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi *Fixed Effect* sebesar -16,12951 dan t-hitung sebesar -11.04885 sedangkan probabilitas sebesar 0.000(<5%). Dengan hasil tersebut maka jumlah wisatawan justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena potensi wisata di masing-masing daerah berbeda cukup tinggi. Kabupaten dengan potensi wisawatannya cukup besar yaitu Gunung Kidul, namun justru PADnya paling rendah. Jumlah wisatawan memang memberikan pada peningkatan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. Disisi lain seperti Kabupaten Sleman yang mayoritas sumber PADnya berasal dari pajak, maka jumlah wisatawan yang kecil tetap mampu meningkatkan PAD yang tinggi karena sumber-sumber pajak yang masih tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Purwanti dan Dewi (2014), yang menemukan bahwa Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Artinya besar kecilnya pengeluaran pemerintah belum mampu meningkatkan PAD. Ini terjadi karena pengeluaran pemerintah sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai daripada belanja modal. Dengan besarnya belanja modal tersebut tidak mempengaruhi PAD di propinsi DIY karena dana tersebut di indikasikan tidak disalurkan dengan benar.
2. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Artinya apabila PDRB suatu daerah mengalami peningkatan maka jumlah PAD akan mengalami peningkatan dan sebaliknya, jika PDRB semakin menurun maka PAD akan semakin kecil. Dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya.
3. Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Artinya besar kecilnya jumlah penduduk suatu daerah tidak mempengaruhi jumlah penerimaan PAD. Ini terjadi karena peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan



pengangguran yang semakin meningkat juga. Hal tersebut bisa terjadi karena kualitas SDM yang belum baik sehingga produktivitas kurang meningkat. Selain itu peningkatan jumlah penduduk juga disebabkan oleh para pendatang yang kebanyakan didominasi mahasiswa atau yang masih sekolah sehingga tidak membayar pajak dan tidak menyumbang PAD.

4. jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di propinsi DIY. Dengan hasil tersebut maka jumlah wisatawan justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah wisatawan antar propinsi yang ada di DIY.

## **5.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota se propinsi DIY mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan PDRB perkapita, karena PDRB yang tinggi berarti kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga diharapkan PADnya mengalami peningkatan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menambah jumlah investasi di sektor industri. Semakin besar investasi di sektor industri maka akan membuat sektor tersebut tumbuh. Sektor tersebut dikatakan tumbuh apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya.

2. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian yang sama dengan obyek / tempat yang berbeda, serta menambahkan variabel-variabel lain seperti faktor inflasi, investasi swasta, dan variabel lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- BPS. (2015). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Cohen, Erik. (1984). “*The Sociology of Tourism : Approach, Issues and Finding*”.  
*Annal of Tourism Reseach*.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso, T. (1985). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Irawan, dan M. Suparmoko. (1987). *Ekonomi Pembangunan (Edisi Keenam)*. Yogyakarta: BPFK Fakultas Ekonomi UGM.
- Ismawan, Wakhit. (2000). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Daerah di Kabupaten Bangka*. UII. Yogyakarta
- Kurniasih, Elia. (2005). *Analisis Peranan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. STIKES. Yogyakarta.
- Marpaung, Happy. (2002). *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Pres.

Santoso, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Puji. (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor – faktor yang mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP) volume 2 (Nomor 1) pp-9-18.

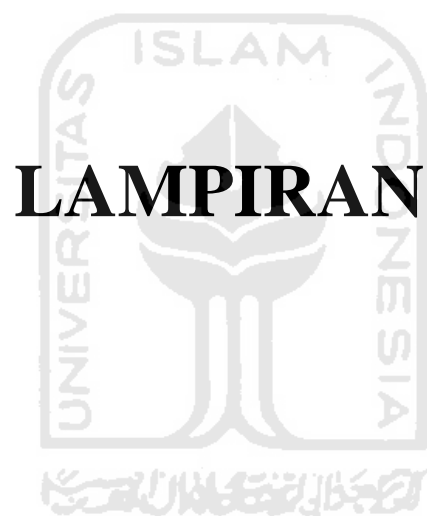
Suartini, Ni Nyoman dan Suyana Utama, Made. (2011). *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar*.

Tuasikal, A. (2008). *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.



# LAMPIRAN

TAHUN	OBYEK	Y	X1	X2	X3	X4
2010	KP	48,589,685.00	680,895,940.00	5,033,073.00	388,869.00	444,125.00
2011	KP	49,488,455.00	688,146,630.00	5,246,146.00	393,796.00	546,797.00
2012	KP	74,028,663.00	881,690,249.00	5,475,148.00	397,639.00	596,529.00
2013	KP	95,991,510.00	935,369,836.00	5,741,660.00	401,450.00	69,585.00
2014	KP	92,815,160.00	1,045,554,896.00	5,992,787.00	405,222.00	904,972.00
2010	GK	42,542,031.00	857,556,526.00	8,848,037.00	675,382.00	687,705.00
2011	GK	41,835,415.00	943,699,321.00	9,248,010.00	682,670.00	688,405.00
2012	GK	67,050,782.00	1,073,458,313.00	9,695,979.00	688,135.00	1,279,065.00
2013	GK	83,427,450.00	1,236,639,665.00	10,177,432.00	693,523.00	1,822,251.00
2014	GK	90,333,150.00	1,345,370,674.00	10,639,465.00	698,825.00	3,685,137.00
2010	BT	81,637,099.00	1,047,910,284.00	12,114,059.00	911,503.00	1,300,042.00
2011	BT	126,885,124.00	917,204,584.00	12,728,666.00	927,846.00	2,378,209.00
2012	BT	166,597,778.00	1,282,878,383.00	13,407,021.00	941,414.00	2,378,209.00
2013	BT	224,197,860.00	1,355,174,641.00	14,138,719.00	955,015.00	2,037,874.00
2014	BT	265,128,260.00	1,734,327,107.00	14,867,407.00	968,825.00	2,708,816.00
2010	SL	163,056,459.00	1,259,754,514.00	21,481,644.00	1,093,110.00	2,499,877.00
2011	SL	170,916,683.00	1,383,997,031.00	22,645,851.00	1,113,297.00	2,490,063.00
2012	SL	301,069,539.00	1,421,401,171.00	23,957,112.00	1,130,140.00	3,042,232.00
2013	SL	449,270,300.00	1,733,223,826.00	25,367,414.00	1,147,037.00	3,612,954.00
2014	SL	383,497,910.00	1,978,674,627.00	26,740,537.00	1,163,970.00	4,223,958.00
2010	YK	179,423,640.00	915,600,803.00	17,202,154.00	388,627.00	3,538,139.00
2011	YK	182,785,819.00	890,333,753.00	18,206,089.00	392,388.00	3,197,312.00
2012	YK	338,839,606.00	1,023,949,917.00	19,189,074.00	395,134.00	4,083,605.00
2013	YK	383,052,140.00	1,134,964,780.00	20,239,557.00	397,828.00	4,641,005.00
2014	YK	404,272,610.00	1,422,093,336.00	21,312,143.00	400,467.00	5,251,352.00

Sumber data: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

**Keterangan:**

Y: PAD

X1: Pengeluaran pemerintah

X2: PDRB

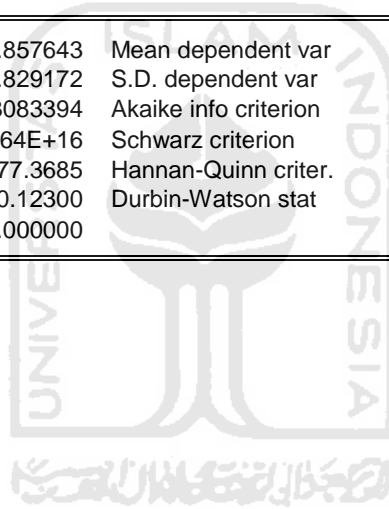
X3: Jumlah Penduduk

X4: Jumlah wisatawan

## MODEL COMMON

Dependent Variable: PAD?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 08/12/16 Time: 15:06  
Sample: 2010 2014  
Included observations: 5  
Cross-sections included: 5  
Total pool (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.04E+08	40980209	-2.547499	0.0192
PP?	0.193598	0.062863	3.079697	0.0059
PDRB?	13.28814	3.953551	3.361065	0.0031
JP?	-200.7218	70.31448	-2.854629	0.0098
JW?	4.287242	17.82192	0.240560	0.8123
R-squared	0.857643	Mean dependent var		1.80E+08
Adjusted R-squared	0.829172	S.D. dependent var		1.28E+08
S.E. of regression	53083394	Akaike info criterion		38.58948
Sum squared resid	5.64E+16	Schwarz criterion		38.83326
Log likelihood	-477.3685	Hannan-Quinn criter.		38.65710
F-statistic	30.12300	Durbin-Watson stat		1.291375
Prob(F-statistic)	0.000000			



## MODEL FIXED

Dependent Variable: PAD?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 08/12/16 Time: 15:10

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 25

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.80E+08	4.17E+08	-2.349480	0.0320
PP?	-0.021882	0.028553	-0.766347	0.4546
PDRB?	64.41199	13.02606	4.944856	0.0001
JP?	417.1603	846.2911	0.492928	0.6288
JW?	-16.12951	1.459837	-11.04885	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
KP--C	5.59E+08			
GK--C	1.82E+08			
BT--C	-43799669			
SL--C	-6.61E+08			
YK--C	-35641200			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.974870	Mean dependent var	2.56E+08	
Adjusted R-squared	0.962304	S.D. dependent var	1.26E+08	
S.E. of regression	31656159	Sum squared resid	1.60E+16	
F-statistic	77.58470	Durbin-Watson stat	2.788869	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.946115	Mean dependent var	1.80E+08	
Sum squared resid	2.13E+16	Durbin-Watson stat	2.943641	



## UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: APOOL

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.338493	(4,16)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PAD?

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 08/12/16 Time: 15:11

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 25

Use pre-specified GLS weights

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-69039125	32573137	-2.119511	0.0468
PP?	0.140245	0.034084	4.114639	0.0005
PDRB?	18.76037	6.068784	3.091290	0.0058
JP?	-199.5238	47.34799	-4.213987	0.0004
JW?	-15.18247	19.04025	-0.797388	0.4346

### Weighted Statistics

R-squared	0.796830	Mean dependent var	2.56E+08
Adjusted R-squared	0.756196	S.D. dependent var	1.26E+08
S.E. of regression	80506900	Sum squared resid	1.30E+17
F-statistic	19.60990	Durbin-Watson stat	0.578396
Prob(F-statistic)	0.000001		

### Unweighted Statistics

R-squared	0.827891	Mean dependent var	1.80E+08
Sum squared resid	6.81E+16	Durbin-Watson stat	1.063584

## MODEL RANDOM

Dependent Variable: PAD?  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 08/12/16 Time: 15:11  
 Sample: 2010 2014  
 Included observations: 5  
 Cross-sections included: 5  
 Total pool (balanced) observations: 25  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.04E+08	27563266	-3.787543	0.0012
PP?	0.193598	0.042281	4.578798	0.0002
PDRB?	13.28814	2.659156	4.997128	0.0001
JP?	-200.7218	47.29348	-4.244174	0.0004
JW?	4.287242	11.98701	0.357657	0.7243
Random Effects (Cross)				
KP--C	0.000558			
GK--C	-0.001293			
BT--C	0.001059			
SL--C	-0.000307			
YK--C	-1.72E-05			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			90.80193	0.0000
Idiosyncratic random			35703862	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.857643	Mean dependent var		1.80E+08
Adjusted R-squared	0.829172	S.D. dependent var		1.28E+08
S.E. of regression	53083394	Sum squared resid		5.64E+16
F-statistic	30.12300	Durbin-Watson stat		1.291375
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.857643	Mean dependent var		1.80E+08
Sum squared resid	5.64E+16	Durbin-Watson stat		1.291375

## UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: APOOL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.209638	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PP?	-0.030832	0.193598	0.004540	0.0009
PDRB?	67.166220	13.288144	254.207750	0.0007
JP?	-129.000160	-200.721772	61	0.9485
JW?	-7.458161	4.287242	120.010063	0.2836

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PAD?

Method: Panel Least Squares

Date: 08/12/16 Time: 15:11

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.41E+08	6.49E+08	-0.988527	0.3376
PP?	-0.030832	0.079546	-0.387604	0.7034
PDRB?	67.16622	16.16412	4.155265	0.0007
JP?	-129.0002	1111.096	-0.116102	0.9090
JW?	-7.458161	16.23880	-0.459280	0.6522

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.948479	Mean dependent var	1.80E+08
Adjusted R-squared	0.922719	S.D. dependent var	1.28E+08
S.E. of regression	35703862	Akaike info criterion	37.89313
Sum squared resid	2.04E+16	Schwarz criterion	38.33192
Log likelihood	-464.6641	Hannan-Quinn criter.	38.01483
F-statistic	36.81937	Durbin-Watson stat	2.916545
Prob(F-statistic)	0.000000		